

BADAN KARANTINA PERTANIAN
Kementerian Pertanian

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI

KANTOR WILAYAH UAPPA-W BA.018.12.537700.KD

SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2019
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019



GARUDA SERTIFIKASI
INDONESIA



Jln. Depati Payung Negara KM 14 No.4 Pekan Sabtu Selebar –Bengkulu
Telp/Fax : (0736) 53066, 52045, 51607
www.skp1bengkulu.karantina.pertanian.go.id

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Telah Direviu	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I Laporan Realisasi Anggaran	5
II Neraca	5
III Laporan Operasional	5
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan atas Laporan Keuangan	5
A Penjelasan Umum	11
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1 Pendapatan	20
B.2 Belanja	21
B.3 Belanja Pegawai	22
B.4 Belanja Barang	24
B.5 Belanja Modal	25
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26
B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26
B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	26
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
C.1 Aset Lancar	27
C.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan	27
C.1.2 Persediaan	27
C.2 Aset Tetap	27
C.2.1 Tanah	27
C.2.2 Peralatan dan Mesin	28
C.2.3 Gedung dan Bangunan	28
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	28
C.2.5 Aset Tetap Lainnya	28
C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	29
C.3 Aset Lainnya	29
C.3.1 Aset Lain-lain	29
C.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	29
C.4 Kewajiban Jangka Pendek	30
C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga	30
C.5 Ekuitas	30
C.5.1 Ekuitas	30

D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	31
D.2	Beban Pegawai	32
D.3	Beban Persediaan	32
D.4	Beban Barang dan Jasa	32
D.5	Beban Pemeliharaan	33
D.6	Beban Perjalanan Dinas	34
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	35
D.8	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	35
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
E.1	Ekuitas Awal	36
E.2	Surplus/Defisit-LO	36
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	36
E.4.1	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	36
E.4.2	Penyesuaian Nilai Aset	36
E.5	Transaksi Antar Entitas	36
E.6	'Ekuitas Akhir	37
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	38
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	38
F.2	Pengungkapan Lain-lain	38

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp256.287.866,00 atau mencapai 116,49% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp220.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp3.569.254.420,00 atau mencapai 44,16% dari alokasi anggaran sebesar Rp8.082.311.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2019.

Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp11.642.154.393,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp413.549.928,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp11.228.604.465,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 dan Rp11.442.154.393,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp266.352.599,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.486.762.250,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-3.220.409.651,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp1.777.029,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-3.218.632.622,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp11.343.809.711,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-3.218.632.622,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.316.977.304,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp11.442.154.393,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

UAPPA-W STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BENGKULU sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian menjalankan tugas pokok dan fungsi karantina dalam mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu melalui seluruh kegiatan yang menunjang berjalannya sistem perkarantinaan.

Visi :

Kondisi ideal tentang masa depan yang terjangkau, meyakinkan dan mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan inti serta fleksibilitas dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, maka Visi STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BENGKULU adalah:

“Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang siaga dan memasyarakat menuju Karantina Pertanian yang tangguh dan terpercaya”

Siaga : Penyederhanaan kata *profesional*, dicirikan dengan semangat ketepatan dan kecepatan kerja, kesadaran, pemahaman terhadap bidang tugas dan peraturan perundangan, serta tanggungjawab sebagai budaya kerja. Tepat menggunakan sarana, prasarana serta teknik perkarantinaan.

Memasyarakat : Perwujudan dari kata *terpercaya* dicirikan dengan tingginya tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan perkarantinaan pertanian, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang ikut merasa memiliki dan berperan aktif dalam pencapaian tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Karantina Pertanian serta penegakan peraturan perundangan perkarantinaan pertanian.

Tangguh : Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah pewujudan pertahanan Negara di bidang Kelestarian Sumber daya alam Hayati Hewan dan Tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya : Keberhasilan Barantan berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik didalam maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan Barantan perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati.

Misi :

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, Prioritas Nasional dan Kebijakan Kementerian Pertanian, maka Misi UAPPA-W STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BENGKULU ditetapkan sebagai berikut:

1. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati dengan mencegah masuk dan keluar Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta mendukung terwujudnya keamanan pangan;
2. Memperkecil peluang penyimpangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perkarantinaan;
3. Meningkatkan citra pelayanan public dan meberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan perkarantinaan;
4. Membangun sarana, prasarana, teknologi perkarantinaan dan sumber daya manusia yang berkualitas;
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar UPT, Badan Karantina Pertanian dan Instansi Terkait.

Nilai – Nilai :

Nilai-nilai yang ditanamkan agar membudaya dalam keseharian dan menjadi perilaku setiap individu di lingkungan organisasi **UAPPA-W STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BENGKULU** sehingga tidak menyimpang dari visi dan misi, yaitu :

1. Berfikir Strategis untuk mencapai tujuan, artinya kami selalu berupaya melakukan pilihan terbaik dalam mencapai tujuan;
2. Berlaku **amanah** dalam mengemban tugas, mengandung arti professional yaitu selalu mengembangkan kemampuan secara terus-menerus dalam bidang tugasnya, dan bertanggung jawab yaitu menggunakan sumberdaya dengan efektif dan efisien;
3. **Inovatif**, terus kreatif mengembangkan cara-cara terbaik dalam mencapai tujuan;
4. **Bekerjasama dan komunikatif**, berkomunikasi untuk memahami kebutuhan stakeholder dan bekerjasama baik internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan;
5. **Science base**, memahami bahwa karantina adalah pengelolaan resiko oleh karena itu selalu mempertimbangan aspek teknologi dan ilmu pengetahuan dalam memutuskan kebijakan;
6. **Berdedikasi dalam pelayanan**, berusaha memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,

dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(6) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	130.000.000,00	130.000.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00
Jumlah Pendapatan	220.000.000,00	220.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.588.741.000,00	2.588.741.000,00
Belanja Lembur	459.628.000,00	459.628.000,00
Belanja Barang Operasional	1.019.639.000,00	1.021.199.000,00
Belanja Barang Non Operasional	308.974.000,00	373.483.000,00
Belanja Barang Persediaan	414.000.000,00	414.000.000,00
Belanja Jasa	567.262.000,00	553.512.000,00
Belanja Pemeliharaan	526.856.000,00	525.296.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.492.630.000,00	1.441.871.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	704.581.000,00	704.581.000,00
Jumlah Belanja	8.082.311.000,00	8.082.311.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp256.287.866,00 atau mencapai 116,49% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp220.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Tabel 6

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Jasa Lainnya	90.000.000,00	97.844.375,00	108,72
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	130.000.000,00	158.443.491,00	121,88
Jumlah	220.000.000,00	256.287.866,00	116,49

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,79% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Tabel 7

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	.%
Pendapatan Jasa Lainnya	97.844.375,00	99.700.000,00	-1,86
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	158.443.491,00	150.026.278,00	5,61
Pendapatan Lain-lain	0,00	2.042.581,00	- 100,00
Jumlah	256.287.866,00	251.768.859,00	1,79

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp3.569.254.420,00 atau 44,16% dari anggaran belanja sebesar Rp8.082.311.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja
per 30 Juni 2019

Tabel 8

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	3.048.369.000,00	1.488.174.377,00	48,82
Belanja Barang	4.329.361.000,00	1.531.916.642,00	35,38

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Modal	704.581.000,00	549.165.400,00	77,94
Total Belanja Kotor	8.082.311.000,00	3.569.256.419,00	44,16
Pengembalian Belanja		-1.999,00	0.00
Total Belanja	8.082.311.000,00	3.569.254.420,00	44,16

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -1,35% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu Anggaran dalam DIPA Tahun 2019 berkurang dibanding tahun sebelumnya dari Rp8.328.923.000,00 menjadi Rp8.328.923.000,00
2. Belanja Pegawai pada periode ini mengalami penurunan dari periode sebelumnya hal ini dikarenakan, adanya pegawai yang mengalami mutasi (terlampir LRA Belanja dari Aplikasi SAIBA)
3. Belanja Barang pada periode ini mengalami Penurunan dari periode sebelumnya hal ini dikarenakan, penurunan pagu Belanja bahan non operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa (langganan listrik, telepon, air, belanja langganan daya dan jasa lainnya, belanja sewa, belanja jasa profesi dan belanja jasa lainnya), belanja perjalanan dalam negeri, Belanja Pemeliharaan (Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, Belanja peralatan dan mesin, Belanja pemeliharaan dan mesin lainya dan belanja pemeliharaan jaringan); (terlampir LRA Belanja dari Aplikasi SAIBA)
4. Belanja Modal pada periode ini mengalami Penurunan dari periode sebelumnya hal ini dikarenakan, penurunan pagu Belanja modal hanya Belanja Modal Peralatan dan mesin sebesar 704.581.000,00 (terlampir LRA Belanja dari Aplikasi SAIBA).

Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Tabel 9

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	.%
Belanja Pegawai	1.488.172.378,00	1.366.201.583,00	8,93
Belanja Barang	1.531.916.642,00	1.807.951.085,00	-15,27
Belanja Modal	549.165.400,00	444.017.500,00	23,68

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	.%
Total Belanja	3.569.254.420,00	3.618.170.168,00	-1,35

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.488.172.378,00 dan Rp1.366.201.583,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 8,93% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Belanja Pegawai pada periode ini mengalami kenaikan dari periode sebelumnya hal ini dikarenakan, adanya pegawai yang mengalami Kenaikan Gaji Berkala (KGB), penambahan anak PNS, kenaikan PNS ke jabatan fungsional dan kenaikan pangkat PNS, dan Belanja lembur PNS; (terlampir LRA Belanja dari Aplikasi SAIBA).

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Tabel 10

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.352.648.377,00	1.177.665.583,00	14,86
Belanja Lembur	135.526.000,00	189.076.000,00	-28,32
Jumlah Belanja Kotor	1.488.174.377,00	1.366.741.583,00	8,88
Pengembalian Belanja Pegawai	-1.999,00	-540.000,00	-99,63
Jumlah Belanja	1.488.172.378,00	1.366.201.583,00	8,93

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.531.916.642,00 dan Rp1.807.951.085,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar -15,27% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja Barang Operasional penyebab kenaikan adanya (Belanja keperluan perkantoran, penamabahan daya tahan tubuh, pengiriman surat dinas POS pusat);
2. Belanja Barang Non Operasional mengalami kenaikan adanya (Belanja bahan, belanja honor output kegiatan, belanja barang non operasional lainnya);
3. Belanja Barang Persediaan (Barang Konsumsi)
4. Belanja Jasa (langganan listrik, telepon, air, belanja langganan daya dan jasa lainnya);
5. Belanja Pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan gedung dan bangunan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan Jaringan.

Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Tabel 11

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	475.576.156,00	420.358.361,00	13,14
Belanja Barang Non Operasional	154.563.000,00	123.334.200,00	25,32
Belanja Barang Persediaan	87.880.500,00	151.691.000,00	-42,07
Belanja Jasa	189.727.940,00	250.786.211,00	-24,35
Belanja Pemeliharaan	157.320.584,00	211.958.186,00	-25,78
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	466.848.462,00	649.823.127,00	-28,16
Jumlah Belanja Kotor	1.531.916.642,00	1.807.951.085,00	-15,27
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.531.916.642,00	1.807.951.085,00	-15,27

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp549.165.400,00 dan Rp444.017.500,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 23,68% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Kenaikan pagu belanja modal karena adanya penambah berupa sarana dan prasarana adapun Pagu belanja modal TA 2019 sebesar Rp704.581.000,00 sedang di TA.2018 sebesar Rp488.710.000,00.

Perbandingan Belanja Modal
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Tabel 12

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	549.165.400,00	344.763.500,00	59,29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	71.039.000,00	-100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	28.215.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	549.165.400,00	444.017.500,00	23,68
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	549.165.400,00	444.017.500,00	23,68

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp549.165.400,00 dan Rp344.763.500,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 59,29% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pembelian P.C Unit 6 Buah Rp.30.389.600,-
2. Pembelian Laptop 3 Unit Rp.33.752.900,-
3. Pembelian kendaraan Roda-4 Minibus 1 Buah Rp.352.281.000,-
4. Pembelian Mesin Absensi 2 Unit Rp.5.886.200,-
5. Pembelian P.C Unit 1 unit Rp.55.000.000,-
6. Pembelian Printer (Peralatan Personal Komputer) 11 unit Rp.18.955.700,-
7. Pembelian AC.Split 10 Unit Rp.42.900.000,-
8. Pembelian Tempat Tidur Besi 1 Unit Rp.10.000.000,-

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Tabel 13

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	549.165.400,00	344.763.500,00	59,29
Jumlah Belanja Kotor	549.165.400,00	344.763.500,00	59,29

Laporan Keuangan SEMESTER I Tahun Anggaran 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	549.165.400,00	344.763.500,00	59,29

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2019

Tabel 14

Uraian	30 Juni 2019
Jumlah	200.000.000,00

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.064.733,00 dan Rp0,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 30 Juni 2019

Tabel 15

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	10.064.733,00	0,00
Jumlah	10.064.733,00	0,00

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-10.064.733,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang

masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Tabel 16

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp213.549.928,00 dan Rp302.814.080,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Tabel 17

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Barang Konsumsi	213.549.928,00	302.814.080,00
Jumlah	213.549.928,00	302.814.080,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.659.984.000,00 dan Rp3.659.984.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp6.381.062.958,00 dan Rp5.986.577.558,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 18

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	5.986.577.558,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	549.165.400,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-154.680.000,00
Saldo per 30 Juni 2019	6.381.062.958,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	-3.972.942.353,00
Nilai Buku per 30 Juni 2019	2.408.120.605,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Pembelian P.C Unit 6 Buah Rp.30.389.600,-
2. Pembelian Laptop 3 Unit Rp.33.752.900,-
3. Pembelian kendaraan Roda-4 Minibus 1 Buah Rp.352.281.000,-
4. Pembelian Mesin Absensi 2 Unit Rp.5.886.200,-
5. Pembelian P.C Unit 1 unit Rp.55.000.000,-
6. Pembelian Printer (Peralatan Personal Komputer) 11 unit Rp.18.955.700,-
7. Pembelian AC.Split 10 Unit Rp.42.900.000,-
8. Pembelian Tempat Tidur Besi 1 Unit Rp.10.000.000,-

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.163.782.438,00 dan Rp5.163.782.438,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp295.834.555,00 dan Rp295.834.555,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp36.895.300,00 dan Rp36.895.300,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-4.308.954.786,00 dan Rp-4.078.201.455,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tabel 19

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	6.381.062.958,00	-3.972.942.353,00	2.408.120.605,00
2.	Gedung dan Bangunan	5.163.782.438,00	-283.088.044,00	4.880.694.394,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	295.834.555,00	-52.924.389,00	242.910.166,00
4.	Aset Tetap Lainnya	36.895.300,00	0,00	36.895.300,00
Akumulasi Penyusutan		11.877.575.251,00	-4.308.954.786,00	7.568.620.465,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp280.498.000,00 dan Rp125.818.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 20

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	125.818.000,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	154.680.000,00
Saldo per 30 Juni 2019	280.498.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	-280.498.000,00
Nilai Buku per 30 Juni 2019	0,00

C.3.2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-280.498.000,00 dan Rp-125.818.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Tabel 21

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	280.498.000,00	-280.498.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		280.498.000,00	-280.498.000,00	0,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp23.876.765,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Tabel 22

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0,00	23.876.765,00
Jumlah	0,00	23.876.765,00

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.442.154.393,00 dan Rp11.343.809.711,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp266.352.599,00 dan Rp249.726.278,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Tabel 23

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	168.508.224,00	150.026.278,00	12,32
Pendapatan Jasa Lainnya	97.844.375,00	99.700.000,00	-1,86
Jumlah	266.352.599,00	249.726.278,00	6,66

Pendapatan Sensor/Karantina Pengawasan/Pemeriksaan berasal dari perlakuan fumigasi dilakukan oleh pihak ketiga dengan perlakuan phospin; Perlakuan fumigasi dengan Methil Bromida, Operasional lalu lintas Media Pembawa Hewan dan Tumbuhan Baik Domestik Masuk, Domestik keluar, dan Ekspor. Pemeriksaan Fisik Diluar Tempat Pemasukan, baik Karantina Tumbuhan dan Karantina Hewan.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.488.172.378,00 dan Rp1.366.201.583,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Tabel 24

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	940.177.940,00	811.283.800,00	15,89

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.718,00	12.997,00	28,63
Beban Tunj. Anak PNS	22.213.710,00	18.070.264,00	22,93
Beban Tunj. Beras PNS	54.677.100,00	48.666.240,00	12,35
Beban Tunj. Fungsional PNS	75.150.000,00	90.660.000,00	-17,11
Beban Tunj. PPh PNS	778.150,00	705.702,00	10,27
Beban Tunj. Struktural PNS	7.740.000,00	8.820.000,00	-12,24
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	68.115.760,00	59.989.580,00	13,55
Beban Tunjangan Umum PNS	25.380.000,00	18.605.000,00	36,41
Beban Uang Lembur	135.526.000,00	189.076.000,00	-28,32
Beban Uang Makan PNS	158.397.000,00	120.312.000,00	31,66
Jumlah	1.488.172.378,00	1.366.201.583,00	8,93

Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp1.488.172.378,00 atau 8,93% dikarenakan, adanya pegawai yang mengalami Kenaikan Gaji Berkala (KGB), penambahan anak PNS, kenaikan PNS ke jabatan fungsional dan kenaikan pangkat

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp182.932.431,00 dan Rp176.277.731,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Tabel 25

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	182.932.431,00	176.277.731,00	3,78
Jumlah	182.932.431,00	176.277.731,00	3,78

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp795.990.331,00 dan Rp769.844.969,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	152.963.000,00	121.434.200,00	25,96
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	57.480.000,00	59.600.000,00	-3,56
Beban Honor Output Kegiatan	1.600.000,00	1.900.000,00	-15,79
Beban Jasa Lainnya	13.792.000,00	69.455.000,00	-80,14
Beban Jasa Profesi	10.820.000,00	12.800.000,00	-15,47
Beban Keperluan Perkantoran	354.679.754,00	288.875.545,00	22,78
Beban Langganan Air	2.442.000,00	4.284.500,00	-43,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	72.119.900,00	81.503.250,00	-11,51
Beban Langganan Listrik	45.730.054,00	62.346.974,00	-26,65
Beban Langganan Telepon	3.247.221,00	7.262.684,00	-55,29
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	61.380.000,00	59.400.000,00	3,33
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.036.402,00	982.816,00	107,20
Beban Sewa	17.700.000,00	0,00	0,00
Jumlah	795.990.331,00	769.844.969,00	3,40

1. Beban Bahan mengalami kenaikan berupa : bahan pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan; bahan pemantaun daerah sebar HPHK; rapat internal hasil pemantauan (monitoring); seminar pemantaun tingkat regional; pengelolaan koleksi HPHK/MP HPHK dan OPTK/MP OPTK; Koordinasi Eksternal Perkarantina; pengawasan terpadu eksternal perkarantina; bimbingan internal UPT; Inhouse Training (Teknis); pengembangan dokumen mutu laboratorium oleh laboratorium penguji; perlakuan karantina hewan dan Tumbuhan; penyusunan laporan-laporan; pengelolaan dan pembinaan SDM; pengembangan prosedur dan ketatalaksanaan.

2. Beban Barang Non Operasional Lainnya belum terrealisasikan dikarenakan belum adanya pengiriman sampel HPHK dan PSH dan pengiriman sampel OPTK dan PSAT ke BBUSKP.
3. Beban Honor Operasional Satuan Kerja mengalami kenaikan pada honor KPA dan PPK dari periode sebelumnya.
4. Beban Honor Output Kegiatan, mengalami penurunan dikarenakan sedikitnya volume kegiatan ditahun ini.
5. Beban Jasa Lainnya berupa biaya sertifikasi ISO 9001:2015; Inhouse training pemutakhiran dokumen.
6. Beban Jasa Profesi biaya profesiensi laboratorium; jasa rujukan KT dan PSAT, Pengiriman sampel OPTK dan PSAT; honor pendamping pemantauan; honor narasumber/moderator;
7. Beban Keperluan Perkantoran mengalami kenaikan disebabkan berupa : keperluan sehari-hari perkantoran; pengelolaan rumah tangga; pembuatan PAS; Pengadaan pakaian kerja; jasa keamanan dan kebersihan; rapat biasa; jamuan tamu.
8. Beban Langganan Air mengalami kenaikan dikarenakan biaya tarif listrik naik pada periode berjalan.
9. Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya mengalami kenaikan karena pada periode ini telah terrealisasikan berupa : langganan internet dan sewa rumah dinas.
10. Beban Langganan Listrik mengalami penurunan dikarenakan tingkat pemakaian daya listrik berkurang pada periode ini.
11. Beban Langganan Telepon mengalami penurunan dikarenakan tingkat pemakaian telepon dan fax berkurang pada periode ini.
12. Beban Penambah Daya Tahan Tubuh mengalami kenaikan dikarenakan anggaran tahun ini mengalami kenaikan dalam harga OH.
13. Beban Sewa mengalami kenaikan dikarenakan biaya sewa rumah dinas mengalami kenaikan.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp157.320.584,00 dan Rp211.958.186,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Tabel 26

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.529.487,00	69.983.000,00	-50,66
Beban Pemeliharaan Jaringan	3.012.000,00	4.045.000,00	-25,54
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119.779.097,00	132.505.186,00	-9,60
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	5.425.000,00	-100,00
Jumlah	157.320.584,00	211.958.186,00	-25,78

a. *Belanja Pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan gedung dan bangunan terdiri atas :*

- Pemeliharaan gedung/bangunan kantor tidak bertingkat
- Pemeliharaan gedung/bangunan kantor bertingkat
- Pemeliharaan gedung laboratorium KT
- Pemeliharaan Musholla wilker pulau Baai
- Pemeliharaan rumah jaga dan pos satpam SKP
- Pemeliharaan incenerator dan IKH
- Pemeliharaan rumah jaga wilker
- Pemeliharaan gedung mess dan gedung operasional
- Pemeliharaan musholla SKP
- Pemeliharaan screen house kaca fiber dan fumigation room
- Pemeliharaan laboratorium KH
- Pemeliharaan rumah genset.diesel SKP dan wilker
- Pemeliharaan halaman dan sarana lingkungan

b. *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdiri dari :*

- Pemeliharaan dan operasional kendaraan operasional lapangan (doubl garden)
- Pemeliharaan dan operasional kendaraan Roda-2
- Pemeliharaan dan operasional kendaraan Roda-4
- Pembayaran pajak kendaraan dinas
- Pemeliharaan printer
- Pemeliharaan Genset lebih dari 50 KVA
- Pemeliharaan Genset 100 KVA
- Bahan bakar genset
- Isi ulang APAR

c. *Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya terdiri dari :*

- Kalibrasi peralatan laboratorium dan peralatan teknis
- d. Pemeliharaan Jaringan terdiri dari :
 - Pemeliharaan jaringan listrik
 - Pemeliharaan jaringan internet/telepon
 - Pemeliharaan jaringan sisitem informasi
 - Pemeliharaan jaringan air

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp466.848.462,00 dan Rp649.823.127,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Tabel 27

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	193.269.328,00	356.917.355,00	-45,85
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.200.000,00	54.710.000,00	-48,46
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49.648.084,00	25.985.000,00	91,06
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	149.821.050,00	133.368.950,00	12,34
Beban Perjalanan Tetap	45.910.000,00	78.841.822,00	-41,77
Jumlah	466.848.462,00	649.823.127,00	-28,16

1. Beban Perjalanan Biasa mengalami kenaikan disebabkan adanya perjalanan pemantauan daerah sebar HPHK dan Surveliensi daerah sebar OPTK, Penilaian kelayakan tempat pemeriksaan pihak ketiga, monitoring dan pengawasan media pembawa OPTK dan HPHK; Perjalanan koordinasi instansi terkait dikabupaten; menghadiri undangan pusat; pengawasan dan tidnakan preventif; pelatihan laboratoriu KH dan KT; Pengambilan sampel KH; pengambilan sampel KT; penialaian IKT; Monitoring dan evaluasi IKT; penialian tempat tindakan KT.
2. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota mengalami penurunan disebabkan jumlah undangan/kegiatan volume rendah dari tahun kemarin berupa pengawasan dan penindakan karantina.

3. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota mengalami penurunan disebabkan tidak dianggarkan dalam periode tahun anggaran ini.
4. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota mengalami kenaikan disebabkan adanya kegiatan rapat/pertemuan Full Board dan luar kantor-pejabat eselon III ke bawah (Bengkulu); perjalanan seminar pusat; Apresiasi jabatan fungsional KT; mengikuti sosialisasi peraturan KH; Sosialisasi peraturan KT; perjalanan apresiasi fungsional KH; Apresiasi pejabat keuangan.
5. Beban Perjalanan Tetap mengalami penurunan disebabkan volume tindakan karantina TKH, pemeriksaan KT, perjalanan TKH, Pemeriksaan KT (dalam kota), pemeriksaan KH (dalam kota), perjalanan pengasingan dan pengamatan, pemeriksaan IKT; Perjalanan perlakuan KT diatas 8 Jam; transpot perlakuan KT, uang harian perlakuan KT diatas 8 Jam.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp385.433.331,00 dan Rp375.768.743,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Tabel 28

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	69.868.873,00	69.868.874,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	2.954.260,00	7.754.260,00	-61,90
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	11.938.000,00	-100,00
Beban Penyusutan Jaringan	857.112,00	857.112,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	311.753.086,00	285.350.497,00	9,25
Jumlah	385.433.331,00	375.768.743,00	2,57

Karena adanya penyusutan Reguler yang dilakukan per Semester pada aplikasi SIMAK-BMN.

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.064.733,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Tabel 29

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	10.064.733,00	0,00	0,00
Jumlah	10.064.733,00	0,00	0,00

Saldo PNB bulan Juni 2019

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Tabel 30

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-16.684.769,00	-100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-6.721,00	-1.929.728,00	-99,65
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.783.750,00	3.642.550,00	-51,03
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.042.581,00	-100,00
Jumlah	1.777.029,00	-12.929.366,00	-113,74

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.343.809.711,00 dan Rp11.544.349.266,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp-3.218.632.622,00 dan Rp-3.313.077.427,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4.2. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.316.977.304,00 dan Rp3.369.550.459,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2019

Tabel 31

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 Juni 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.569.254.420,00
Diterima dari Entitas Lain	-256.287.866,00
Transfer Keluar	-559.250,00
Transfer Masuk	4.570.000,00
Jumlah	3.316.977.304,00

E.5.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 30 Juni 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-256.287.866,00 sedangkan DKEL sebesar Rp3.569.254.420,00.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp4.570.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 30 Juni 2019

Tabel 32

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	4.570.000,00
Jumlah			4.570.000,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp-559.250,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 30 Juni 2019

Tabel 33

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018122900528860000KD	-559.250,00
Jumlah			-559.250,00

E.6. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.442.154.393,00 dan Rp11.600.822.298,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

- Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu adalah sebagai berikut :
Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran : Mochamad Ischaq, SP.M.Si
Kepala Urusan Tata Usaha : Wisnu Ramadhani, S.Kom
Kasubsie Yanops : drh.Hemey Puji Harsanti
- Pengelolah Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebgai berikut :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran oleh Mochamad Ischaq, SP.M.Si
 - b. Pejabat pembuat Komitmen oleh Drh.Hemey Puji Harsanti
 - c. PPSPM oleh Wisnu Ramafhani, S.Kom
 - d. Bendahara Pengeluaran oleh Salmiah, S.Sos
 - e. Bendahara Penerima oleh Andiman
 - f. Verifikator Keuangan : Ahmad Riduan,SH; Eriwidya Hartati
 - g. Pembuat Daftar Gaji oleh Eka Sulistyaningrum, A.Md
 - h. Pejabat Pengadaan oleh Bambang Irawan, A.Md
 - i. Pejabat Penerima hasil pekerjaan dijabat oleh Hasan Said
- Sampai dengan 31 Desember 2018 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. DIPA Revisi 1 Tanggal 08 Januari 2019
 2. DIPA Revisi 2 Tanggal 29 Maret 2019
 3. DIPA Revisi 3 Tanggal 28 Juni 2019

LAMPIRAN

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Satker
2. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 08/07/W-LK SM I/2019
3. BAR Rekon KPPN per 30 Juni 2019
4. Print out Aplikasi E_Rekon
5. Print Out Laporan dari SAIBA
6. DIPA Awal dan DIPA Akhir 2019
7. POK Awal dan POK Akhir 2019
8. LPJ Bendahara Pengeluaran
9. LPJ Bendahara Penerimaan
10. Memo Penyesuaian
11. DUK Kepegawaian